

MODUL PENGANTAR HUKUM INDONESIA



**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Rini Apriyani, S.H.,M.H.**

MODUL
Semester Gasal 2021/2022
PENGANTAR HUKUM
INDONESIA



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Rini Apriyani, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN
SAMARINDA
2021

MODUL SEMESTER GASAL 2021/2022
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022
Hak cipta ada Pada Penulis
xxxvii + 212 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-6225-52-3

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Rini Apriyani, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

MODUL SEMESTER GASAL 2021/2022
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Diterbitkan (Cetakan 1) April 2022 oleh:
Pustaka Ilmu
Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul,
Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan modul Pengantar Hukum Indonesia (PHI) untuk Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun ajaran 2021-2021 semester gasal.

Modul mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini, merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal (semester 1), yang baru akan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan sebagai pengetahuan dasar.

Modul ini, secara substansi berisi rincian/tahapan perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia yang diberikan selama semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal.

Metode dalam modul ini Pengantar Hukum Indonesia dengan cara *one way*, dan sebagian diberikan dengan metode *Problem Based Learning* yang terjadwal. Fungsi Modul ini untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi substansi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, sehingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan modul ini secara seksama sebelum proses pembelajaran akan dimulai. Modul ini substansi dasar, yang menjadi titik anjak bagi mahasiswa baru, untuk mengenal hukum-hukum positif yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini. secara

substansi, merupakan konsep, teori, norma dasar di dalam pembentukan hukum-hukum Indonesia.

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan dari modul ini, untuk itu segala saran, kritik, masukan untuk perbaikan modul ini. Kesempurnaan adalah milik Pencipta Ala mini (Allah SWT). Terimakasih buat ayah Ibu yang selalu mendoakan dinda, sehat selalu. Suamiku yang mendorong terus untuk berkarya atas motivasi dan doa-doanya, serta kasih sayang, cinta, kebersamaan dalam kehidupan “D”.

Pada saat ini bangsa kita, menghadapi pandemi covid 19, dampak dalam pola belajar dilakukan melalui daring. Proses pembelajaran dengan daring, sebagai pengganti tatap muka, berakibat pada pola pembelajaran bagi mahasiswa. Adaptasi dengan ilmu dan teknologi, baik dosen dan mahasiswa, juga mempengaruhi proses pembelajaran, dan inovasi-inovasi baru selama perkuliahan dengan media daring. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan dapat melakukan proses pembelajaran tata muka antara dosen, mahasiswa yang maksimal.

Mahasiswa sebagai generasi Z, tentu sangat mudah mengakses informasi dan teknologi, dan beradaptasi. Proses pembelajaran daring, banyak tantangan dan harapan yang masih jauh dari proses belajar tatap muka. Semoga modul ini, menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam memahami pengantar hukum Indonesia

Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang di dalam hidupnya banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Modul ini sebagai iktiar saya untuk memberi manfaat bagi

mahasiswa. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan manfaat” amiin.

Samarinda, 20 Januari 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	iii
• DAFTAR ISI	vi
• PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA	xv
• DESKRIPSI MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA	xvi
• CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MATA KULIAH	viii
• METODE PEMBELAJARAN	xix
• BERPERILAKU DAN INTEGRITAS AKADEMIK	xxv
• PENILIAN	xxvii
• SUMBER BELAJAR	xxx
• JADWAL	xxxvi

MODUL 1: MENGENAL PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1
A. Latar Belakang mempelajari Pengantar Hukum Indonesia	1
B. Tujuan Pengantar Hukum Indonesia	1
C. Jadwal Kegiatan perkuliahan pertama	2
D. Penilaian perkuliahan Pertama	2
E. Kegiatan dalam perkuliahan pertama	2

1. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia	2
2. Pengertian Hukum	3
3. Pengertian Tata Hukum di Indonesia	4
4. Sejarah Tata Hukum di Indonesia	5
5. Pembinaan Hukum di Indonesia	6
Tugas Individu/Kelompok	7
MODUL 2: SUMBER HUKUM DAN BAHAN HUKUM	8
A. Latar Belakang mempelajari sumber hokum	8
B. Tujuan sumber hokum	8
C. Jadwal Kegiatan perkuliahan kedua	8
D. Penilaian perkuliahan kedua	9
E. Kegiatan dalam perkuliahan kedua	9
1. Pengertian Sumber Hukum	9
2. Klasifikasi Hukum	10
3. Bahan-Bahan Hukum	11
Tugas Individu/Kelompok	11
MODUL 3: PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA	13
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Tata Negara	13
B. Tujuan Belajar Pengantar Hukum Tata Negara	13
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Ketiga	14
D. Penilaian Perkuliahan Ketiga	14
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Ketiga	14
1. Pengertian Hukum Tata Negara	14
2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	15
3. Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara...	20
4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum	

Lainnya	21
5. Asas-Asas Hukum Tata Negara	23
6. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara	24
7. Sistem Pemerintahan Indonesia	25
Tugas Individu/Kelompok	26
MODUL 4: PENGANTAR HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	27
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Administrasi Negara	27
B. Tujuan Belajar Pengantar Hukum Administrasi Negara	28
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keempat	28
D. Penilaian Perkuliahan Keempat	28
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Empat	28
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara	29
2. Perbuatan Hukum Administrasi Negara	29
3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Lainnya	33
4. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	34
5. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	36
6. Peradilan Tata Usaha Negara	37
Tugas Individu/Kelompok	39
MODUL 5: PENGANTAR HUKUM PIDANA	
DAN HUKUM ACARA PIDANA	40
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	40
B. Tujuan Belajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	40

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kelima	41
D. Penilaian Perkuliahan Kelima	41
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kelima	41
1. Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	41
2. Pembagian Hukum Pidana	41
3. Pristiwa Pidana, Tindak Pidana dan Delik Hukum Pidana	43
4. Macam-macam Perbuatan Pidana	43
5. Jenis-Jenis Hukum Pidana	44
6. Asas-Asas Hukum Pidana	44
7. Macam-macam Pidana	45
8. Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana	45
9. Asas-Asas yang Terkandung dalam KUHP	47
Tugas Individu/Kelompok	55
MODUL 6: PENGANTAR HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA	56
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata	56
B. Tujuan Belajar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	57
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keenam	57
D. Penilaian Perkuliahan Keenam.....	57
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Keenam	57
1. Pengertian Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	57
2. Sejarah Hukum Perdata dan Hukum Acara	

Perdata	57
3. Sistematika Hukum Perdata	58
4. Pengantar Hukum Acara Perdata	66
5. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	71
6. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	74
7. Perbedaan Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.....	75
8. Cara Mengajukan Gugatan Perdata	77
9. Upaya Hukum	79
Tugas Individu/Kelompok	80
MODUL 7: UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SESUAI JADWAL	81
Bahan dari modul 1 sampai modul 6.	
MODUL 8: PENGANTAR HUKUM DAGANG ...	84
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Dagang	84
B. Tujuan Belajar Hukum Dagang	85
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kedelapan	85
D. Penilaian Perkuliahan Kedelapan	85
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kedelapan	85
1. Pengertian Hukum Dagang	85
2. Sejarah Hukum Dagang	86
3. Sumber-Sumber Hukum Dagang	87
4. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ..	88
Tugas Individu/Kelompok	89
MODUL 9: PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN	90
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Ketenagakerjaan	90
B. Tujuan Belajar Hukum Ketenagakerjaan	91

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kesembilan	91
D. Penilaian Perkuliahan Kesembilan	91
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kesembilan	91
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	92
2. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan	92
3. Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaan	94
4. Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan ..	94
5. Hubungan Kerja	97
6. Perselisihan Hubungan Industri	99
Tugas Individu/Kelompok	103
MODUL 10: PENGANTAR HUKUM AGRARIA	104
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Agraria	104
B. Tujuan Belajar Hukum Agraria	104
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kesepuluh	104
D. Penilaian Perkuliahan Kesepuluh	105
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kesepuluh	105
1. Pengertian Hukum Agraria	105
2. Sejarah Hukum Agraria	106
3. Tujuan Hukum Agraria	108
4. Asas-Asas Hukum Agrarian	108
5. Sumber-Sumber Hukum Agraria	109
6. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria	110
Tugas Individu/Kelompok	115
MODUL 11: PENGANTAR HUKUM PAJAK	116
A. Latar Belakang Pengantar Hukum Pajak	116
B. Tujuan Belajar Hukum Pajak	116
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kesepuluh	117
D. Penilaian Perkuliahan Kesepuluh	117

E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kesepuluh	117
1. Pengertian Hukum Pajak.....	117
2. Fungsi Pajak	118
3. Jenis-Jenis Pajak.....	119
4. Asas-Asas Hukum Pemungutan Pajak	121
5. Sistem Pemungutan Hukum Pajak	122
Tugas Individu/Kelompok	124
MODUL 12: PENGANTAR HUKUM	
INTERNASIONAL DAN PENGANTAR	
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	125
A. Latar Belakang Hukum Internasional dan Perdata	
Internasional	125
B. Tujuan Belajar Hukum Nternasinal dan Perdata	
Internasional	126
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kedua belas.....	126
D. Penilaian Perkuliahan Kedua belas	126
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kedua belas	126
1. Pengertian Hukum Internasional dan Perdata	
Internasional	126
2. Sumber-Sumber Hukum Internasional	127
3. Subyek Hukum Internasional	130
4. Isi Hukum Internasional	131
5. Pengertian Hukum Perdata Internasional	134
6. Peraturan-Peraturan Hukum Perdata	
Internasional	134
Tugas Individu/Kelompok	135
MODUL 13: PENGANTAR HUKUM ADAT	136
A. Latar Belakang Terbentuk Hukum Adat dan	

Hukum Islam	136
B. Tujuan Belajar Hukum Adat dan Hukum Islam	137
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Ketigabelas	137
D. Penilaian Perkuliahan Ketigabelas	137
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Ketigabelas	137
1. Pengertian Hukum Adat	137
2. Sifat dan Lingkungan Hukum Adat	138
3. Corak Hukum Adat	140
4. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum)	140
5. Sistem Hukum Adat	142
Tugas Individu/Kelompok	145
MODUL 14: PENGANTAR HUKUM ISLAM	146
A. Latar Belakang Terbentuk Hukum Adat dan Hukum Islam	146
B. Tujuan Belajar Hukum Adat dan Hukum Islam	147
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keempat belas	147
D. Penilaian Perkuliahan Keempat belas	147
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Keempat belas	147
1. Pengertian Hukum Islam	147
2. Sumber Hukum Islam	148
3. Ciri-ciri Hukum Islam	151
Tugas Individu/Kelompok	153
MODUL 15: PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN	154
A. Latar Belakang Hukum Internasional dan Perdata Internasional	154
B. Tujuan Belajar Hukum Internasional dan Perdata	

Internasiona	154
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kelima belas	154
D. Penilaian Perkuliahan Kelima belas	155
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kelima belas	155
1. Pengertian Hukum Lingkungan	155
2. Asas Hukum Lingkungan	156
3. Tujuan Hukum Lingkungan	159
4. Kondisi dan Permasalahan Lingkungan Global ..	160
5. Kondisi Permasalahan Lingkungan Nasional	164
6. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan	165
7. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	167
8. Hak, Kewajiban, dan Larangan	167
9. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	170
10. Peran Masyarakat	175
11. Penyelesaian Sengketa Lingkungan	176
12. Penegakan Hukum Lingkungan	179
Tugas Individu/Kelompok	182
MODUL 16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)...	183
Dalam ujian semester, akan diujikan materi pada pertemuan 8-sampai 13.	
• BIODATA PENULIS	186

SUMBER BELAJAR

- A.Hanafie, 1980, *Ushul Fiqh*, Widjaya, Jakarta;
- A.Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- A.Rahman I.Do, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- A.Siti Soetami, 1992, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung;
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta;
- Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, RajaGrafindo, Jakarta;
- Abdul Ghofar Anshori, Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta;
- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung;

- Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bambang Poernomo, 1985, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta;
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta;
- Budiono, Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata negara Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka;
- H.Amir Syarifuddin, 2001, *Usbul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta;
- H.A.Syafi'i Karim, 2001, *Fiqih Usbul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung;
- H.Mustofa, H.Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hartono Hadisoepipto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Hilman Hadikusumah, 1978, *Sejarah Hukum Adat*, Alumni, Bandung;

- Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- J.B.Daliyo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- J.B.Daliyo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
-, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum – Buku Panduan Mahasiswa*, Prehalindi, Jakarta;
- J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Grafitri Budi Utami, Bandung;
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta;
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung;
- L.J. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung;
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M.Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung;

- Mochtar Kusumaatmadja, 1981, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta;
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agus, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta;
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit UGM, Yogyakarta;
- Moh. Koesnoe, 1992, *Hukum adat sebagai suatu model hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada;
- Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbulnya dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Muchtar yahya, Fatchur Rahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Almaarif, Bandung;
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta;
- R. Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

- R.Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta;
- Ralph C. Honer, 1986, *Contemporary Bussines La : Principles and Cases*, Mc Graw-Hill Book, New York;
- Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta;
- Rochmat Soemitro, 1992, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung;
- SM.Amin, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Soebekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung;
- Soerjono Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Sudikno Mertokoesoemo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Supomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Siti Kotijah, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Taka Press, Samarinda;

-, 2017, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Taka Press, Samarinda;
-, 2020, *Pengantar Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Jogjakarta;
-, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Refisi, Pustaka Ilmu, Yogyakarta;
-, 2019, *Kontruksi Administrasi Pemerintah: Membedah UU No.30 Tahun 2014*, MFA: Yogyakarta;
-, 2020, *Hukum Acara dan Praktek PTUN*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1977, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta;
- Tjitrosoedibjo Soebekti, 1969, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta;
- Van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung;
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta;
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Penerbit Djambatan, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung;
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung;
- Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung;

- Y.Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta;
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Yulies Tiana Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Mualifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta;
- Zainuddin Ali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta.

MODUL 1

MENGENAL PENGANTAR HUKUM INDONESIA

A. Latar Belakang

Pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari hukum. Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan mata kuliah dasar yang ditempuh bagi pemula (calon yuris).

PHI obyek adalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (disebut dengan hukum positif). PHI sebagai pengantar yang mengantarkan hukum yang Sebatas di Indonesia yang berlaku saat ini. secara umum PHI merupakan pengantar hukum untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/ tata hukum yang berlaku di Indonesia. PHI sebagai pengenalan dan pengantar hukum Indonesia untuk memberikan pemahaman awal kepada pemula (calon yuris) sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.

B. Tujuan Pengantar Hukum Indonesia

1. Mempelajari pengertian, dan memahami macam-macam hukum (bentuk, isi), yang berlaku di Indonesia;
2. Mempelajari pengertian dan memahami perbuatan-perbuatan hukum yang wajib, harus, dilarang menurut hukum Indonesia;

3. Mempelajari pengertian dan memahami hak, kewajiban, kedudukan setiap orang dalam masyarakat, dan negara menurut hukum Indonesia; dan
4. Mempelajar pengertian dan memahami prosedur hukum (acara peradilan) yang ada dan diterapkan di Indonesia.

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan

Jadwal Kegiatan Perkuliahan Pertama, pada Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2021, melalui zoom meeting.

D. Penilaian Perkuliahan

Pada pertemuan awal, penilian pada perilaku mahasiswa, kesiapan dalam belajar dari mahasiswa terhadap PHI.

E. Kegiatan

1. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “pengantar,” “hukum” dan “Indonesia.” Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut “*Inleiding*” dan “*Introduction*” (bahasa Inggris) yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesu-atu hal tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia.

PHI merupakan satu rangkaian dengan Pengantar Ilmu Hukum, dimana keduanya merupakan mata kuliah yang

merupakan satu kesatuan mata kuliah dasar bagi calon yuris yang akan mempelajari ilmu hukum.

PHI merupakan ilmu pengetahuan dasar atau fondasi dalam bidang hukum, yang merupakan pengembangan dari materi kelanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum yang lebih difokuskan pada lapangan bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia.

2. Pengertian Hukum

Pengertian hukum banyak secara pengertian dan pandangan yang diberika beberapa ahli hukum dari zaman plato, ahli dari luar negeri, dan dari dalam negeri sudah memberi pandangan apa itu hukum.

Batasan pengertian hukum, salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo,¹ mengemukakan, “hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dimana keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yaitu masyarakat, dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum itu, dimaknai sebagai kaidah/norma yang ada di masyarakat. Norma yang ada dalam kehidupan masyarakat antara lain:

¹ Sudikto Mertakusuma, 2005, *Menganal Hbukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.40.

a. Norma Kaidah Agama

Sebagai kaidah aturan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kewajiban/larangan yang dilakukan manusia/penganutnya;

b. Norma Kaidah Kesusilaan

Sebagai kaidah yang mengatur hidup manusia yang berasal dari hati nurani (dalam jiwa manusia), perasaan bersalah terkait perilaku yang baik dan dan tidak baik;

c. Norma Kaidah Kesopanan

Sebagai kaidah yang mengatur hidup yang timbul dari pergaulan-pergaulan masyarakat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan;

d. Norma Kaidah Hukum

Suatu aturan yang tertulis yang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan dasar untuk mengatur masyarakat

3. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Pengertian tata hukum Indonesia, menyusun dan mengatur tertib kehidupan di Indonesia. Tujuan tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.

Tata hukum dapat diinterpretasikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikia rupa, sehingga orang mudah menemukan bila,

suatu ketika membutuhkannya, guna menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Tata hukum yang ada di masyarakat ditaati sebagai hukum positif Indonesia (*ius constitutum*). *Ius constitutum* sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai dasar dalam berperilaku, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Sejarah hukum Indonesia tidak lepas dari Hindia Belanda yang menjajah di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan hukum di di Indonesia, dengan membedakan 3 (tiga) yaitu hukum Eropa yang berlaku untuk orang Eropa, hukum yang berlaku untuk Timur Tengah (India, China, Jepang, dan Arab), dan hukum yang berlaku pada pribumi (masyarakat Indonesia) yaitu hukum adat yang berlaku di daerah-daerah yang diakui masyarakat.

Pada masa Jepang, yang berlaku Peraturan *Asamu Sirei* (UU Bala Tentara Jepang) Nomor.1 Tahun 1942, Pasal 3 menyebutkan, segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, menerapkan asas konkrodasi, yang intinya hukum-hukum dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku, selama belum ada yang mengaturnya. Contoh BW (KUHPperdata), KUHDagang.

E. Pembinaan Hukum Indonesia

Berkembangnya hukum yang begitu cepat mengikuti perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Untuk itu dibentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. BPHN tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Fungsi BPHN antara lain yaitu:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan hukum nasional;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan hukum nasional;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- d) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan badan;
- e) Pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan hukum nasional dan program legislasi nasional (prolegnas);
- g) Pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum;
- h) Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya membentuk budaya hukum masyarakat; dan
- i) Pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan perpustakaan hukum.

Tugas Individu

1. Mengidentifikasi hak dasar warganegara;
2. Mengidentifikasi kewajiban dasar warganegara; dan
3. Mengidentifikasi pengaturan hak, dan kewajiban warganegara

Tugas Kelompok anda membuat video virtual hak, kewajiban, pengaturan dalam UUD NRI 1945.

Petunjuk Mengerjakan Tugas Individu (*take home*)

1. Anda dowland UUD NRI Tahun 1945, amandemen pertama, kedua, ketiga, dan empat;
2. Setelah anda, kualifikasi mana yang masuk hak-hak, dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh negara dalam UUD NRI Tahun 1945
3. Anda tabelkan hak, dan kewajiban warga negara dengan membuat excel.

Petunjuk Mengerjakan Tugas Kelompok

1. Silakan anda membentuk kelompok maksimal 7 (tujuh) orang, setelah pilih ketua, tim teknis yang membuat membuat zoom bersama, dan diskusi virtual dengan kelompok anda membahas yang sudah buat di tugas individu, dengan durasi maksimal 10 menit menggunakan zoom.
2. Setelah itu, hasil diskusi virtual itu, anda upload melalui google drive, dan link di share di MONSL, dengan menambahkan to sharing, supaya dapat diakses semua orang.

BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Suami : Evans Sofanus S.E., S.T.
Orangtua : Ibu Yasitin Dan Bapak Ja'es
Saudara : Zainul Aripin S.H., M.Kn.
Wiwin Erna Ida Wati, S.H
Eli Fita, S. Sos.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman Samarinda
Email : skkotijah8@gmail.com/sitikotijah@fh.unmul.com.
Sitikotijah/blogsport.com

Riwayat Pendidikan

- a. SD N 1 Desa Senden Kecamatan Peterongan.Kabupaten Jombang Jawa Timur
- b. SMP N1 Negeri Peterongan, 1990 Kabupaten Jombang Jawa Timur
- c. SMA PRGI 1 Jombang, 1993 Jawa Timur

- d. Sarjana : S1 Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1997
- e. Magister : S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2009
- f. Doktor : S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

Jabatan

- 1. Ketua Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Pulitbangwil) Lembaga Penelitian di Universitas Mulawarman, Tahun 2009-2012.
- 2. Bidang Hukum Pada Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang (KPD) Daerah Kalimantan Timur, di Propinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2016-2018
- 3. Sebagai Staff Ahli Hukum di Bidang Akademik di Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2019-2020.

Karya Ilmiah Penelitian Dalam Studi

- 1. Skripsi, *Peranan Parwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tingkat II Lombok Barat*, 1997.
- 2. Tesis, *Implementasi Prinsip-Prinsip Kebutuhan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan*, 2009,
- 3. Desertasi, *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara*, 2015.

Pengalaman Penelitian

1. Upaya Pemberantasan Terhadap Aktifitas Ilegal Logging Ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur, 2006
2. *Tinjauan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Terhadap Permasalahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan*, 2007.
3. *Disign Principle For Collaborative Forest Governance In Accordance With Local Characteristics, Changes in Forest Policy Indonesian Since 2005 to 2007*, The Universitas of Tokyo and CSF Unmul; CSF Unmul.
4. *Peran Pendamping Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Poltabes Samarinda*, Lemlit Unmul 2007.
5. *Upaya Pemberantasan Terhadap Aktivitas Ilegal Logging Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur*, Lemlit Unmul, 2007.
6. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kukar Kaltim (Tim)*, April 2007, Dosen Muda Dikti/ Lemlit Unmul.
7. *Kajian Tentang Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar SLTP/SLTA di Kabupaten Kutai Kertanegara*; Agustus 2009, Puslibangwil Unmul dan Balitbanda Kukar.
8. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pinjaman Lunak UKM Di Kabupaten Berau (Tim)*, November 2009 LPPM Unmul dan Balitbanda Berau.
9. *Reperda Penetapan Tarif PDAM Di Kabupaten Kutim, (Tim)* 2009, LPPM dan PDAM Kutim.

10. *Pengembangan Rencana Kawasan Perbatasan di Kabupaten Malinau, 2009*, Puslibanwil Unmul dan Balitbanda Malinua (Tim).
11. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kukar (Tim)*, Desember 2009, Puslibangwil Unmul dengan Lemlit unmul, 12 oktober 2009.
12. *Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Kutai barat (Tim)*, juli 2009, Puslitbawil Unmul dengan Pembangunan Sekretariat Daerah Kubar.
13. *Kajian Pemakaran Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, 7 Oktober 2009*, Puslibangwil Unmul dan Pemerintah Kabupaten Paser.
14. *Penguasaan Sumber Daya Hutan Oleh Negara Di Tinjau UU No.41 Tahun 1999 jo UU No19 Tahun 2004 tentang Kehutanan*, (Balitbanda Kukar, April 2010).
15. *Kegiatan Penyusunan, DPPL jalan dan jembatan Kabupaten Nunukan*, 4 November 2009, Puslibangwil dengan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nunukan.
16. *Aspek Hukum Penetapan Kawasan Lindung Untuk Pertambangan diTinjau dari UU No.19 Tahun 2004*, Fakultas Hukum, 2010.
17. *Penelitian Pembangunan Kebijakan bidang ekonomi dan kemasyarakatan Kota di Samarinda*, (tim) Puslitbawil, Juni 2010.;
18. *Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Nunukan (tim)*; September 2010;
19. *Studi tentang Permasalahan Tanah Adat dan Tanah Ulayat di Wilayah* (tim) Kukar 2010;
20. *Studi Pengembangan wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kertanegara*, (Tim) Puslitbangwil, Desember 2010;

21. *Penyusunan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Kabupaten Kutai Kartanegara*, April 2011, Sekretariat Kabupaten Kukar dan Puslitbangwil.
22. *Penyusunan Perencanaan Optimalisasi Pasar Tradisional Di Propinsi Kaltim, dinunukan, Januari 2012*, Lemlit Unmul dan Puslitbangwil.
23. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Februari 2012, Balitbanda Kabupaten Bulungan dan Puslitbangwil;
24. *Kajian teknis penguatan daya saing industry kecil dan menengah di Kaltim*, Lemlit, dan Pustabangwil Unmul, 2012.

Jurnal Ilmiah

1. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur*. Jurnal Hukum Vol.2, No.2 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.
2. *Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek Ilegal logging di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.2, No. 1 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.
3. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmiah Mahakam, Vol.7, No.1, ISSN 1412-6885, Edisi Juni 2008.
4. *Penguasaan Sumber Daya Hutan oleh Negara di Tinjau UU. No.41 tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kebutuhan*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.13, ISNN 1907-3836, Edisi April 2010).
5. *Hilangnya Megadiversity Di Kalimanta Timur*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.14 ISNN 1907-3836, Edisi Oktober 2010).

6. *Pengaruh narkoba terhadap kehidupan para pelajar SLTP dan SLTA di Wilayah kabupaten Kutai Kertanegara*, Gerbang Etam, Jurnal penelitian dan pengembangan daerah, ISSN 197-838x, vol.4 no.1 tahun 2010.
7. *Implementasi Prinsip-Prinsip Kebutuhan Dalam Rangka Konseversi Kebutuhan*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister ilmu hukum universitas Wisnuwardhan, Volume 1 No. 2 Oktober 2010.
8. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berdampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister ilmu hukum universitas Wisnuwardhana, Volume 2 No. 2 Oktober 2011;
9. *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda*, dijurnal Yuridika, Vol.27, No.1, Januari-April 2012 ISSN 0215-849X (Januari-April 2012)
10. *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.3, September-Desmbe 2011, ISSN 0215-849X (September-Desember 2011).
11. *Islam Dan Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.2, September-Desmber 2011, ISSN 0215-849X (Mei-Agustus 2011).
12. *Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Essensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Jurnal Juridika, Vol.26 No.1, Januari-April 2011, ISSN 0215-849X (Januari-April 2011).
13. *Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Gender dalam Kebijakan Tambang*, Jurnal Hukum Lingkungan

Universitas Indonesia, Edisi Bahasa Indonesia, Akaditansi Dikti 980.270.99.000012. Volume 36 XVII-2012/26 September 2012.

14. *Hak Masyarakat atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat (Society Rights of A Fine And Healty Environment)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
15. *Kajian Islam dalam masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda (Islam: Studes Regarding to Environmental in Samarinda City)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
16. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, ADRI, Internasional Journal of Scientic Conference and Call for Papers, Vol.1 No.1, Januari 2018, E-ISSN: 2615-3149.
17. *Preventive Regulations to Remove Environmental to Mangrove Ecosystem at East Kalimantan, Indonesia*. Di Internasional Journal of Reseach in Law, Ekonomic and Social Sciences, Vol.1 I Juni 2019, E. ISSN 2656-2723, P-ISSN 2656-2731..
Doi:<http://doi.org/10.32501/INJURILESS.V1IT52> (I Juni 2019)
18. *Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat (studi di [polres kutai timur) (1 juni 2019)*, Jurnal Mulrev, valume 1 issue No.1 tahun 2019.
19. *Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (Stegostoma Fasciatum) Dari Aktifitas Illegal Fishing*,

Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021.

20. *Oil Refinery Dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang*, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021.
21. Penerapan Asas Primun Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Terakretasi Nasional vol.27 No.3 Juli-September 2021,

Procedding/Call Paper

1. *Hak Atas Perempuan Di Samarinda*, Pertemuan Komisi Nasional Perempuan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Jakarta
2. *Tata Kelola SDA Yang Mengakibat Dampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Procedding Seminar on Humanitaian Action Studies 2011, building peace through the improvement of humanitaian diplomacy, Univesitas Gajah Mada, Yogjakarta October 12, 2011. (12 Oktober 2011)
3. *Kajian Islam Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda*, Konferensi Antarbangsa Islam Borneo IV, 26-27 Oktober 2011 Unmul Samarinda;
4. *Penyelesaian Sengketa Bidang Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Sebagai Upaya Menegakkan Sistem Syariah*, Konferensi Antarbangsa Islam Borneo 26-26 Juni 2012, Brunai Darusalam;

5. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Konteks Perempuan dan Kebijakan Pertambangan di Kota Samarinda Kalimantan Timur*, Proceeding Internasional Gende Conference 2012 (IGC 2012): Gender and Development Issues and Challenges Universiti Teknologi MARA Malaysia (2012)
6. *Kajian Filsafat Hukum Hak Penambangan*, Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Melampaui perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat' Surabaya, 27-28 Agustus 2013 (2013)
7. *The Liability of Regional Administrative of Samarinda Due to the Environmental Impact of the Coal Mining Business Activity in Samarinda*, Internasional Conference on Forestry and Mining, 10-12 Desember 2013 Hasanuddin University Makasar;
8. *Ratio Decidendi of The Supreme Court Verdict Number 1400/K/Pdt/1986 about Interfaith Marriage in Islamic Law Perspective Reviving and strengthening Islamic Law As a Living Law Within World's Legal System*, 3rd Intenasional Conference on Islamic Law In Indonesia, Septembe 4-6 2018, At Faculty of Law Mulawaman Univesity, Samainda (2018)
9. *The Criteria For Standard Damage To Seagrasses In The Perspective Of Environmental Law*, The 3rd Internasiona Seminar the Natural Resources Law for People's Welfare, 11-13 November 2018, Faculty of Law, University Jambi Indonesia (2018)
10. *Genetic Quality Standard Appropriate with The Development of Science And Teknologigal In The Perspektive Of Environmental*

- Law*, Internasional conference on tropical agrifood, feed and fuel (ICTAFF), Mesra Business 7 Resort Hotel Samarinda, 13-14th, 2018 (2018);
11. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, Internasional Conference and Call Paper 16th ADRI, Samarinda.
 12. *Criteria for Damage to Peat Ecosystems in the Environmental Law Perspective*, Internasional Conference on Tropical Studies and Its Application. 18 September 2018, Balikpapan;
 13. *Criteria for Damage to Karst in the Environmental Law Perspective*, The 1st International Symposium on Tropical Forestry and Environmental Sciences (ISTFES 2018), Faculty of Forestry Mulan, 3-4 October 2018, Samarinda.
 14. *Kriteria Kerusakan Terumbu Karang Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Call for Papers Seminar Nasional (HA-PSL-IPB), 1 November 2018.
 15. *Implications of Perda 8 of 2013 on the Organizers of Reclamation and post-mining in Coal Mining in East Kalimantan*, Call for Paper, The Role of New, Renewable & Clean Energy in Achieving SDG7: Policy, Investment, & Technology, 26 April 2019, Jakarta.
 16. *Perlindungan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Migran pada Sektor Pertambangan*, Proceeding Seminar Hukum (SHN), Ende 2 Mei, 2019, Nusa Tenggara Timur.
 17. *Kebenaran Dalam Mendapat Keadilan Yang Proporsional Pada Penjatuhan Pidana Korupsi di Era Post Truth*, Call Paper

Seri Filsafat Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post Truth. Lombok, Mei 2019

Poster

Poster Internasional Workshop" Disaster risk reduction and climate change adaptation in the perspektive of education for sustainable development: challenges and opportunities in the Asia Pasific Region" The Asia 5th Asia Pasific RCE-ESD Meeting Le Grandeur Hotel Balikpapan, July 16-18, 2012 Indonesia. Environmental Law's Protection for The Victim of Post Mining Activity Samarinda (2012)

Hak Cipta

1. Hak Cipta *Buku Pengantar Hukum Indonesia*, 22 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100466
2. Hak Cipta *Buku Perbandingan Sistem Hukum*, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100919
3. Hak Cipta *Buku Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari permasalahan petambangan batubara*, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100917
4. Hak Cipta *Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100918
5. Hak Cipta *Buku Pengantar Baku Mutu Bioteknologi*, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133560
6. Hak Cipta *Buku Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133561

7. Hak Cipta Buku *Ajar Hukum Kebutuhan*, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144108
8. Hak Cipta Buku *Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur*, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000132228
9. Hak Cipta Buku *Dub...., Ruas-Ruas Hukum Kebutuhan*, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144051
10. Hak Cipta Buku *Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan*, 19 Juni 2019, Nomor Pencatatan 000144050
11. Hak Cipta Buku *Ajar Hukum Perizinan Online Single Submising (OSS)*, 24 September 2020, Nomor Pencatatan 000205341
12. Hak Cipta Buku *Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara Modul 1*, 18 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242954
13. Hak Cipta Buku *Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, Seri Lima* 13 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242993.
14. Hak Cipta Buku *Ajar Hukum Administrasi Negara, dalam Paradigma UU Ciptakerja*, Nomor Pencatatan 000306799.

Orasi Ilmiah

Rapat Senat Terbuka Yudisium Studi Ilmu Hukum Angkatan IV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2015/2016, Selasa 22 Maret 2016, judul *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara*.

Buku

a. Buku Referensi

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan, 2010.
2. Perca Anotasi: Esai Perempuan Kalimantan, 2010.
3. Duh...Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, 2014.
4. Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara, 2017.
5. Duh...Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, 2017
6. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Pertama), 2017.
7. *Introduction to Environmental Law*, 2017, USA.
8. Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi: Dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2018.
9. Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, 2018.
10. Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, 2018.
11. Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, 2018.
12. Kontruksi Hukum Adminitrasi Pemerintahan, Membedah UU No.30 Tahun 2014, terbit 2019.
13. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kedua), 2019.
14. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Ketiga), 2019,
15. Hukum Perkebunan Indonesia, 2019.

16. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Keempat), 2020.
17. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kelima), 2020.
18. *Internasional Legal Perspective of Environmental Law (At A Glance)*, 2020.
19. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2020.
20. Kumpulan Kitab Hukum *Nederlandsch: Burgelijke Wetboek (KUHPerdata), Wetboek Handling (KUHD), HIR-KUHEPERDATA, Rbg, RV, KUHP, KUHAP*, 2021.
21. Sistem Perizinan Dan Non Perizinan Di Kalimantan Timur, 2021.
22. Menelisik Pengawasan Bersama Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, 2021.
23. *Mining Activitys anda Legal Aspects*, 2021
24. *Medical Professionals and Law*, 2021

b. Buku Chapter

1. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Pertama), 2021.
2. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Kedua), 2021.
3. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Ketiga), 2021.

c. Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, 2017
2. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, 2017.

4. Buku ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2017.
5. Buku Ajar Kehutanan, 2019.
6. Buku Ajar Perizinan Dalam Online Single Submitting (OSS), 2020.
7. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, 2020.
8. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Edisi Revisi, 2021.
9. Buku Ajar Hukum Perkebunan, 2021.
10. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Dalam Paradigma UU Ciptakerja, 2021.

c. Diktat

1. Diktat Ilmu Negara, 2010.
2. Diktat Pidana Lingkungan, 2010.
3. Diktat Hukum Kesehatan Lingkungan, 2011.
4. Diktat Penataan Ruang, Edisi 1, 2011
5. Diktat Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup, 2011.
6. Diktat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, 2015.
7. Diktat Hukum Adat, 2020.

d. Modul

1. Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, Modul 1, 2020.
2. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik (*Online*), Modul 2, 2020.
3. Modul Hukum Administrasi Negara, 2022 (ISBN)
4. Modul Hukum Adat, 2022, (ISBN)

Publikasi Koran/Majalah/Media Online

1. Kaltim Post, Sabtu 26 Maret 2011, *Mengenal Dosen Fakultas Hukum Siti Kotijah, Kenalkan kaltim lewat Blog, celoteh* (inspirasi perempuan);
2. Samarinda Pos, Rabu Maret 2011 *Unmul Siap Bantu atasi kekurangan fasilitas DKP,*
3. Koran Kaltim, senin 24 januari 2011, *Pengambil kebijakan bisa dipidanakan*
4. Tribun Kaltim, 21 April 2011 *Sanksi Adminitrasi terhadap perusahaan lingkungan di Samarinda*
5. Samarinda Post, Jumat 15 April, *Satu koin Untuk Atasi Sampah*
6. Kaltim Post, Jumat 15 April 2011, *Mahasiswa yang kumpulkan koin untuk membeli kointainer sampah, Pribatni karena berserakan di dalam kota.*
7. Tribun Kaltim, Jumat 15 April 2011, *sumbang 1 koin untuk samarinda, mahasiswa fakultas hukum unmul louching “ koin container* Tribun Kaltim, Senin 18 April 2011, *Pemkot Tak Merasa Tersinggung; baru terkumpul Rp. 1 juta.*
8. Majalah Online [www.kanaliforamasi](http://www.kanaliforamasi.com) Com, RTRW *Kaltim penuh kepentingan, Jakarta*
9. Majalah Bongkar Kaltim, 2 Juni 2011, *Jaminan Reklamasi tambang di Kota Samarinda.*
10. Majalah BORNEO (barometer Magazine), Jaminan Reklamasi, Edisi 02. 1 november 2011, ISSN 0772088653997.
11. Majalah Bongkar Kaltim, Pertambangan di Kota Samarinda, 8 Agustus 2011.
12. Kaltim post, Kota samarinda layak sebagai kota tambang, 10 september 2011.
13. Kaltim Post, Alih fungsi lahan pertanian untuk pertambangan, 22 oktober 2011.

Artikel

Yang dimuat Media Online Gagasanhukum.Wordpress.com,
ISSN 19799373.

2008

- 1) *Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 7 April 2008
- 2) *Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, 9 April 2008
- 3) *Konsumen Terjebak Iklan Tarif Seluler*, 30 April 2008
- 4) *Hak Masyarakat Adat Kaltim*, 7 Mei 2008
- 5) *Memahami Filosofi PP No. 2 Tahun 2008*, 22 Mei 2008
- 6) *Bisnis Alib Fungsi Hutan Lindung*, 14 Mei 2008
- 7) *PP No. 2 Tahun 2008 Jangan Dipakai Hancurkan Hutan*, 29 Mei 2008
- 8) *Oligarki Penebangan Liar*, 5 Juni 2008
- 9) *Dimensi Penebangan Liar*, 12 Juni 2008
- 10) *Proyek CPO dan Kebancuran Hutan*, 20 Juni 2008
- 11) *Bencana Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung*, 26 Juni 2008
- 12) *Eferio Proyek Perkebunan Kelapa Sawit*, 3 Juli 2008
- 13) *Mencegah Potensi Konflik Kewenangan Pengelolaan Perikanan*, 10 Juli 2008
- 14) *Pembalakan Liar Sulit di Pidana?*, 17 Juli 2008
- 15) *Tipologi Cukong Pembalakan Liar*, 24 Juli 2008
- 16) *Tipologi Korupsi Pembalakan Liar*, 31 Juli 2008
- 17) *Kelemahan UU Kehutanan*, 7 Agustus 2008
- 18) *Menggugat Corporate Social Responsibility*, 14 Agustus 2008
- 19) *Kerusakan Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 21 Agustus 2008
- 20) *Konsep Berkelanjutan dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, 28 Agustus 2008

- 21) *Memaknai perubahan PP No.6 Tahun 2007*, 4 September 2008
- 22) *Kawasan Hutan Lindung Pasca Terbitnya PP No.3 Tahun 2008*, 11 September 2008
- 23) *Hilangnya Megadiversity*, 18 September 2008
- 24) *Bencana Ekologi*, 25 September 2008
- 25) *Moratorium Logging*, 2 Oktober 2008
- 26) *Carbong Trading*, 9 Oktober 2008
- 27) *Esensi Lingkungan*, 13 Oktober 2008
- 28) *Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, 23 Oktober 2008
- 29) *Mala Administrasi dan Pembalakan Liar*, 30 Oktober 2008
- 30) *Pembalakan Liar dan Pembuktian Terbalik*, 6 November 2008
- 31) *Konsep Kerusakan Hutan*, 13 November 2008
- 32) *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, 20 November 2008
- 33) *Penyalagunaan Wewenang dan Cacat Prosudur*, 27 November 2008
- 34) *Mengugat Hak Rakyat Atas Lingkungan*, 4 Desember 2008
- 35) *Mediasi Sengketa Lingkungan*, 1 Desember 2008
- 36) *Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan Lindung*, 18 Desember 2008
- 37) *Hukum Kehutanan Administrasi*, 25 Desember 2008.

2009

- 38) *Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan*, 1 Januari 2009
- 39) *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan*, 8 Januari 2009
- 40) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian I)*, 15 Januari 2009
- 41) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian II)*, 22 Januari 2009

- 42) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian III)*, 29 Januari 2009
- 43) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Daerah*, 5 Februari 2009
- 44) *Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air*, 12 Februari 2009
- 45) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*, 19 Februari 2009
- 46) *Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan*, 26 Februari 2009
- 47) *Tindak Pidana Korporasi*, 5 Maret 2009
- 48) *UU No.19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan*, 12 Maret 2009
- 49) *Hukum Lingkungan dan Pemanasan Global* 19 Maret 2009
- 50) *Nilai-nilai Konservasi Sumber Daya Alam*, 26 Maret 2009
- 51) *Konsep Hukum Pengelolaan Pesisir*, 2 April 2009
- 52) *Prinsip-prinsip Kebutuhan*, 9 April 2009
- 53) *Sistem Perijinan Lingkungan Daerah*, 16 April 2009
- 54) *Pengaturan Internasional Bidang Kebutuhan*, 23 April 2009
- 55) *Konservasi sumber daya hutan*, 30 April 2009
- 56) *Pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan*, 7 Mei 2009
- 57) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, 14 Mei 2009
- 58) *Good governance dan Lingkungan Hidup*, 21 Mei 2009
- 59) *Investasi dan Lingkungan*, 28 Mei 2009
- 60) *Ekolabeling*, 4 Juni 2009
- 61) *Perubahan Iklim*, 11 Juni 2009
- 62) *Fungsi Ekologi*, 18 Juni 2009
- 63) *Penggunaan Kawasan Hutan*, 25 Juni 2009
- 64) *Mengugat Penegakan Hukum Lingkungan*, 2 Juli 2009
- 65) *Memaknai Samarinda Sebagai Kota Tambang*, 9 Juli 2009
- 66) *Nasib Hutan Kaltim*, 16 Juli 2009
- 67) *Emas Hitam dari Sanggata Kaltim*, 23 Juli 2009
- 68) *Pembangunan Berkelanjutan*, 30 Juli 2009

- 69) *Bahan Obat di Kalimantan*, 6 Agustus 2009
- 70) *Hutan Kemasyarakatan* 13 Agustus 2009
- 71) *Eksistensi Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 20 Agustus 2009
- 72) *Menyikapi Putusan Bebas Pelaku Illegal logging*, 27 Agustus 2009
- 73) *Isu Lingkungan*, 3 September 2009
- 74) *Perlindungan HKI Pada Obat Tradisional*, 10 September 2009
- 75) *Perijinan dan Ilegal logging*, 17 September 2009
- 76) *Nasip Orang Utan Kalimantan*, 1 Oktober 2009
- 77) *Pembangunan Perbatasan Kaltim*, 15 Oktober 2009
- 78) *Ekologi dan Pembangunan*, 2 November 2009
- 79) *Ekologi Tradisional Dayak Tunjung Di Kutai Barat*, 12 November 2009
- 80) *Analisis Filosofis UU No.32 Tahun 2009*, 19 November 2009
- 81) *Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Sungai Wain*, 26 November 2009
- 82) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, 3 Desember 2009
- 83) *Hutan Masyarakat di Kaltim*, 10 Desember 2009
- 84) *Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, 17 Desember 2009
- 85) *Hutan Kemasyarakatan di Kutai Barat*, 24 Desember 2009
- 86) *Prinsip Keanekaragamahayati Pada UU No.32 Tahun 2009*, 31 Desember 2009.

2010

- 87) *Labirnya LBH Kaltim Versus Kasus Lingkungan Hidup*, 7 Januari 2010
- 88) *Pendidikan Lingkungan Hidup*, 14 Januari 2010
- 89) *Sosologis Pengelolaan Hutan*, 21 Januari 2010
- 90) *Politik dan Kebijakan Kehutanan*, 28 Januari 2010
- 91) *Negeriku sayang, negeriku malang*, 4 februari 2010

- 92) *Anggrek Hitam dari Kutai Barat*, 11 februari 2010
- 93) *Pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur*, 18 februari 2010
- 94) *Nasib Hutan dibukit Soebarto*, 25 februari 2010
- 95) *Kampanye Lingkungan Hidup*, 4 Maret 2010
- 96) *Hari Perempuan dan Tambang Di Kaltim*, 11 Maret 2010
- 97) *Banjir Kap Batubara Kaltim*, 18 Maret 2010
- 98) *Sekuritay Dan Perubahan Iklim*, 25 maret 2010
- 99) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 1*, 1 Apri
- 100) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 2*, 8 Apri 2010
- 101) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 3*, 15 Apri
- 102) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia4*, 22, Apri
- 103) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 5*, 31 Apri 2010
- 104) *Dilema Emas Hitam Kaltim*, 5 Mei 2010,
- 105) *Pembangunan Kota Tarakan Dengan Konsep Hijau*, 13 Mei 2010
- 106) *Protocol Kyoto*, 20 mei 2010
- 107) *Hari Biodiversity, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Kaltim*, 27 Mei 2010
- 108) *Nasib Keanekaragaman Hayati di Kaltim*, 3 Juni 2010
- 109) *Fungsi Publik Lingkungan*, 10 Juni 2010.
- 110) *Konsep Ekonomi Berwawasan Lingkungan*, 17 Juni, 2010
- 111) *Implikasi Perda No.2 Tahun 2001 di Kabupaten Kukar*, 24 Juni 2010
- 112) *Transparasi Pertambangan Pada penpres No. Tahun 2010*, 1 Juli 2010
- 113) *Hak Menguasai Sumber Daya Alam DI Kaltim*, 9 Juli 2010

- 114) *Mentraspormasi Pengelolaan SDA Kaltim*, 15 Juli 2010
- 115) *Pasar Karbon REDD*, 22 Juli 2010
- 116) *Kolonialisasi pertambangan dikaltim*, 29 Juli 2010
- 117) *Hap Hip Pesta Emas Hitam, Menuai Bencana Di Kaltim*, 5 Agustus 2010
- 118) *Kenapa Balikpapan Bebas Ijin Emas Hitam*, 12 Agustus 2010
- 119) *Kaltim Tergadai Atas Nama Izin*, 19 Agustus 2010
- 120) *Konsep Perlindungan Masyarakat Adat*, 25 Agustus 2010
- 121) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terpencil Terabaikan 1*, 3 September 2010
- 122) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terkecil Terabaikan II*, 9 September 2010
- 123) *Environmental Accounting*, 16 September 2010
- 124) *Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kaltim*, 30 September 2010
- 125) *Pengelolaan Perbatasan Kaltim*, 14 Oktober 2010
- 126) *Perkebunan Kelapa Sawit, Siapa Yang diuntungkan Di Kaltim*, 21 oktober 2010
- 127) *Mencermati Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau*, 28 Oktober 2010
- 128) *Banjir dan Janji Wali Kota Samarinda*, 4 November 2010
- 129) *Wisata Tambang di Kaltim*, 11 November 2010
- 130) *Pengukuhan Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA Di Katim*, 18 November
- 131) *Ekoregion, Menata Baru Isu Lingkungan Secara Intergal*, 25 November 2010, Media online gagasanhukum.wordpress.com, ISSN 1979-9373;
- 132) *Nasib Wilayah Kepulauan Terluar Di Bulungan Kaltim*, 2 Desember 2010

- 133) *Legal Oponi Kajian Yuridis UU NO.32 Tabun 2009 Tentang PPLH, terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Cagar Alam Adang Di Paser oleh PT Kedeco Jaya Agung, 9 Desember 2010*
- 134) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 16 Desember 2010*
- 135) *Pengaturan Sanksi Adminitrasi Di UU No.32 Tabun 2009 Dalam Permbuatan Amdal Untuk Usaha Pertambangan, 23 Desember 2010*
- 136) *Jeda Izin Tambang Dalam Gerakan Sebuah Harapan dan Aktualisasinya, 23 Desember 2010,*

2011

- 137) *RTRWP Kaltim, Pesta Konversi Hutan, 7 Januari 2011*
- 138) *Bencana Perubahan Iklim, 14 Januari 2011*
- 139) *Menyikapi Naskah Akademik RUU Kobati, 20 Januari 2011*
- 140) *Kartel Bisnis Pertambangan Kaltim, 27 Januari 2011*
- 141) *Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam Kaltim, 11 Januari 2011*
- 142) *Desain Penataan Ruang dan Pengembangan PemekaranDdaerah Kaltim, 24 fabruary 2011*
- 143) *Kawasan Lindung Samarinda, 7 Maret 2011,*
- 144) *Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda, 14 Maret 2011*
- 145) *Revisi RTRW Kaltim PenuhKkepentingan, 21 maret 2011*
- 146) *Menbut,Tambang dan Samarinda, 28 Maret 2011*
- 147) *Jamrek Kriminalisasi Pertambangan Di Kota Samarinda, 5 April 2011*
- 148) *Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda, 13 April,2011*
- 149) *Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih, 24 April*

- 150) *Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntah, Dan Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah Keebrsihan Kota Samarinda*, 30 April 2011
- 151) *Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina (MBCT) di Kabupaten Kutim*, 7 Mei 2011
- 152) *Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil* 7 Juni 2011
- 153) *Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim*, 14 Juni 2011
- 154) *Mengunggat Pengbargaaan Proper Di Kaltim*, 21 Juni 2011
- 155) *Samarinda dikepung Batubara*. 1 Juli 2011
- 156) *Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Goespersia*, 7 juli 2011
- 157) *Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda*, 14 Juli
- 158) *Perlunya Tata Kelola Pertambangan*, 28 Juli 2011
- 159) *Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan*, 5 Agustus 2011
- 160) *Rencana Perda Hoauling*, 15 Agustus 2011
- 161) *Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim*, 25 Agustus 2011
- 162) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009, Bagian 1*, 22 September
- 163) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009, Bagian 2*, 29 September
- 164) *Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika*, 5 Oktober 2011
- 165) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (I)*, 27 Oktober 2011
- 166) *Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (II)*, 3 November 2011
- 167) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)*, 10 November 2011

- 168) *Alib Fungsi Laban Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)*, Diterbitkan 17 November 2011
- 169) *Alib Fungsi Laban Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)* 24 November 2011
- 170) *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur*, 1 Desember 2011.

2012

- 171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda
- 172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
- 173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang
- 174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda
- 175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda
- 176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
- 177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi
- 178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim
- 179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)
- 180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)
- 181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan
- 182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda
- 183) Kegagalan Manajemen Energi
- 184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi
- 185) Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim
- 186)
- 187) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang
- 188) Pentingnya Konferensi Rio+20

- 189) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan
- 190) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto
- 191) Pengendalian Ekspor Mineral
- 192) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal
- 193) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat
- 194) Membangun Green Religion
- 195) Pertambangan Ramah Lingkungan
- 196) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH
- 197) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
- 198) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 199) Tindak Lanjut Langkah Jatim Kaltim

Setiap detik yang kita miliki, jadikan diri kita manusia yang bermanfaat buat semua di mana pun”. Yang lalu bukan milik kita, dan ke depan belum tentu milik kita. MARI Memberi manfaat dan berdampak pada lain. Dalam setiap aktivitas sertakan Doa Tuhan, Orangtua, serta Suami. DV.

Samarinda, 20 Januari 2022



Rini Apriyani, S.H., M.H.

Penulis kelahiran Tenggarong, Kalimantan Timur ini adalah dosen program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2005.

Muslimah yang mengambil kekhususan di Hukum Islam dan minat studi Hukum Pidana ini menyelesaikan pendidikan formal Sarjana Hukum di Universitas

Lambung Mangkurat, Banjarmasin dan dilanjutkan dengan menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Brawijaya. Salah satu mata kuliah dasar yang diampu oleh Penulis adalah Pengantar Hukum Indonesia.

Email: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

MODUL




PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Modul mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini, merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal (semester 1), yang baru akan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan sebagai pengetahuan dasar. Modul ini, secara substansi berisi rincian/tahapan perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia yang diberikan selama semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal.

Metode dalam modul ini Pengantar Hukum Indonesia dengan cara *one way*, dan sebagian diberikan dengan metode *Problem Based Learning* yang terjadwal. Fungsi Modul ini untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi substansi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, sehingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan modul ini secara seksama sebelum proses pembelajaran akan dimulai. Modul ini substansi dasar, yang menjadi titik anjak bagi mahasiswa baru, untuk mengenal hukum-hukum positif yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini. secara substansi, merupakan konsep, teori, norma dasar di dalam pembentukan hukum-hukum Indonesia.

- Modul 1: Menegal Pengantar Hukum Indonesia
- Modul 2: Sumber Hukum dan Bahan Hukum
- Modul 3: Pengantar Hukum Tata Negara
- Modul 4: Pengantar Hukum Administrasi Negara
- Modul 5: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
- Modul 6: Pengantar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata
- Modul 7: Ujian Tengah Semester (UTS) Sesuai Jadwal
- Modul 8: Pengantar Hukum Dagang
- Modul 9: Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
- Modul 10: Pengantar Hukum Agraria
- Modul 11: Pengantar Hukum Pajak
- Modul 12: Pengantar Hukum Internasional dan Pengantar Hukum Perdata Internasional
- Modul 13: Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam
- Modul 14: Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam
- Modul 15: Pengantar Hukum Lingkungan
- Modul 16: Ujian Akhir Semester (UAS)



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

